

Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat: Kritik atas Indeks Zakat Nasional Puskas Baznas

Hashfi Hizrian Atiqi
Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia
Email: hashfihizrian97@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis relevansi Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai instrumen pengukuran kinerja lembaga pengelola zakat di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang dianalisis melalui teknik content analysis. Sumber data berasal dari dokumen resmi Indeks Zakat Nasional yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, berbagai regulasi terkait pengelolaan zakat, serta literatur ilmiah yang membahas pengukuran kinerja organisasi dan tata kelola zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IZN merupakan instrumen yang penting dalam mendukung pengukuran kinerja pengelolaan zakat secara nasional karena mengintegrasikan aspek kelembagaan, tata kelola, dan dampak zakat terhadap mustahik. Namun demikian, beberapa indikator dalam dimensi makro, seperti regulasi daerah dan dukungan APBD/APBN, cenderung lebih relevan bagi BAZNAS dibandingkan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga berpotensi menimbulkan bias pengukuran. Selain itu, perkembangan tata kelola zakat modern menunjukkan perlunya penambahan indikator yang mencerminkan transparansi digital, inovasi program, kualitas layanan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi IZN melalui penyempurnaan indikator agar lebih inklusif, objektif, dan adaptif terhadap perkembangan ekosistem zakat di Indonesia.

Kata Kunci: Indeks Zakat Nasional; Kinerja Lembaga Zakat; Lembaga Amil Zakat; Pengelolaan Zakat; Tata Kelola Zakat.

Abstract

This study aims to critically evaluate the relevance of the National Zakat Index (NZI) as a performance measurement instrument for zakat management institutions in Indonesia. The research employs a qualitative approach using a library research method and is analyzed through content analysis techniques. The data sources consist of official National Zakat Index documents published by the Center for Strategic Studies of BAZNAS (Puskas BAZNAS), regulations related to zakat management, and scholarly literature discussing organizational performance measurement and zakat governance. The findings indicate that the NZI plays an important role in supporting the performance evaluation of zakat management at the national level by integrating institutional, governance, and social impact dimensions. However, several indicators within the macro dimension, such as regional regulations and government budget support, are more relevant to BAZNAS than to private zakat institutions (LAZ), potentially creating measurement bias. Furthermore, the development of modern zakat governance highlights the need to incorporate indicators related to digital transparency, program innovation, service quality, and information technology utilization. This study recommends reconstructing the NZI by refining its indicators to make it more inclusive, objective, and adaptive to the evolving zakat ecosystem in Indonesia.

Keywords: National Zakat Index; Zakat Governance; Zakat Management Institutions; Zakat Performance Measurement; Zakat Institutions.

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Berbagai kebijakan fiskal dan program perlindungan sosial telah diterapkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang memiliki fungsi sosial-ekonomi untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat keadilan distributif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mustahik apabila dikelola secara efektif dan profesional (Beik & Arsyianti, 2015; Shirazi, 2014).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang bertugas mengoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional. Selain BAZNAS, pengelolaan zakat juga dilakukan oleh berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi secara independen dan memperoleh legalitas dari pemerintah. Keberadaan BAZNAS dan LAZ menunjukkan bahwa ekosistem perzakatan di Indonesia melibatkan berbagai aktor dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda, sehingga diperlukan sistem tata kelola yang baik untuk memastikan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat (Beik, 2016).

Seiring meningkatnya peran lembaga pengelola zakat, kebutuhan akan instrumen pengukuran kinerja menjadi semakin penting. Pengukuran kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi internal, tetapi juga sebagai sarana akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam konteks organisasi nirlaba, pengukuran kinerja memungkinkan lembaga untuk menilai sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai melalui indikator input, proses, output, outcome, dan dampak (Mubarokah, 2017). Bagi lembaga zakat, pengukuran kinerja menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh efektivitas penyaluran dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik.

Sebagai upaya untuk menyediakan alat evaluasi yang terstandarisasi, Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS mengembangkan Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN merupakan instrumen pengukuran kinerja yang dirancang untuk menilai kondisi pengelolaan zakat secara komprehensif melalui dua dimensi utama, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro berfokus pada dukungan eksternal terhadap pengelolaan zakat, seperti regulasi, dukungan pemerintah, dan ketersediaan basis data zakat. Sementara itu, dimensi mikro menilai aspek kelembagaan dan dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik (Puskas BAZNAS, 2016; Puskas BAZNAS, 2020). Kehadiran IZN menjadi salah satu inovasi penting dalam pengembangan tata kelola zakat di Indonesia karena memberikan kerangka evaluasi yang lebih sistematis dibandingkan pendekatan sebelumnya.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian lebih banyak berfokus pada implementasi dan pengukuran kinerja menggunakan IZN tanpa mengkaji secara kritis kesesuaian indikator yang digunakan terhadap karakteristik seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia. Sebagian besar indikator dalam dimensi makro, seperti regulasi daerah dan dukungan APBD/APBN, dirancang berdasarkan karakteristik kelembagaan BAZNAS yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi penggunaan IZN bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi secara independen dan tidak memiliki akses terhadap dukungan regulasi maupun anggaran pemerintah sebagaimana dimiliki oleh BAZNAS.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan konseptual dalam penerapan IZN sebagai instrumen pengukuran kinerja nasional. Sebagai indeks yang diklaim dapat digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan zakat secara luas, IZN seharusnya mampu mengakomodasi perbedaan karakteristik antara BAZNAS dan LAZ. Apabila terdapat indikator yang hanya relevan untuk satu jenis lembaga, maka hasil pengukuran berpotensi menghasilkan bias dan tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja riil lembaga yang diukur. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kritis terhadap struktur dan komponen IZN guna memastikan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas yang memadai sebagai alat ukur kinerja seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis relevansi Indeks Zakat Nasional sebagai instrumen pengukuran kinerja lembaga pengelola zakat di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi indikator-indikator yang berpotensi menimbulkan bias pengukuran serta memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap struktur IZN agar lebih inklusif dan dapat diterapkan secara proporsional pada BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja zakat yang lebih komprehensif, objektif, dan sesuai dengan dinamika kelembagaan perzakatan di Indonesia.

Kajian Teori

Zakat dan Pengelolaannya

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi ibadah sekaligus fungsi sosial ekonomi. Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*) sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis (Qardhawi, 1973). Selain berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan jiwa, zakat juga berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang memiliki dampak terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan (Shirazi, 2014).

Dalam konteks modern, pengelolaan zakat memerlukan kelembagaan yang profesional agar penghimpunan dan pendistribusian zakat dapat dilakukan secara efektif. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang bertugas mengoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional. Selain BAZNAS, pemerintah juga memberikan izin kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk melaksanakan fungsi penghimpunan dan pendistribusian zakat. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan kinerja lembaga pengelola zakat (Beik, 2016).

Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis untuk menilai tingkat pencapaian tujuan organisasi melalui indikator tertentu yang dapat diukur dan dievaluasi. Neely et al. (2005) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan mekanisme yang digunakan organisasi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan aktivitas yang dilakukan. Dalam organisasi modern, pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup aspek operasional, pelayanan, tata kelola, dan dampak yang dihasilkan.

Kaplan dan Norton (1996) melalui konsep *Balanced Scorecard* menjelaskan bahwa kinerja organisasi harus diukur secara komprehensif melalui berbagai perspektif yang saling melengkapi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi tidak cukup

diukur berdasarkan hasil akhir semata, tetapi juga melalui proses yang menghasilkan kinerja tersebut. Dalam organisasi nirlaba seperti lembaga zakat, pengukuran kinerja menjadi semakin penting karena organisasi tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan pada pencapaian tujuan sosial dan peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Oleh karena itu, indikator yang digunakan harus mampu menggambarkan aspek input, proses, output, outcome, hingga dampak yang dihasilkan organisasi (Mubarokah, 2017).

Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat

Perkembangan pengelolaan zakat mendorong munculnya berbagai instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja lembaga zakat. Abdullah et al. (2012) mengembangkan *Zakat Effectiveness Index* yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan zakat berdasarkan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Sementara itu, Noor et al. (2015) mengembangkan model evaluasi kinerja lembaga zakat melalui pendekatan input, proses, output, dan outcome yang dikenal sebagai *Zakat Index*. Pendekatan ini menempatkan kinerja lembaga zakat tidak hanya pada aspek penghimpunan dana, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan dan dampak yang dihasilkan.

Di Indonesia, kajian pengukuran dampak zakat berkembang melalui model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) yang dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti (2015). Model ini mengukur kesejahteraan mustahik berdasarkan dimensi material dan spiritual secara simultan. Selain itu, Nurzaman (2011) juga mengembangkan pendekatan pengukuran kesejahteraan mustahik melalui modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disesuaikan dengan karakteristik penerima zakat. Berbagai pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kinerja lembaga zakat tidak hanya menilai aspek kelembagaan, tetapi juga dampak sosial ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan zakat.

Indeks Zakat Nasional (IZN)

Sebagai upaya membangun sistem pengukuran kinerja yang terstandarisasi, Pusat Kajian Strategis BAZNAS mengembangkan Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur tingkat perkembangan dan kinerja pengelolaan zakat di Indonesia secara komprehensif (Puskas BAZNAS, 2016). IZN terdiri atas dua dimensi utama, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro menilai dukungan eksternal terhadap pengelolaan zakat yang meliputi regulasi, dukungan pemerintah, dan ketersediaan basis data zakat. Sementara itu, dimensi mikro menilai aspek kelembagaan dan dampak zakat yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, pelaporan, kesejahteraan mustahik, modifikasi IPM, dan tingkat kemandirian mustahik.

Pengembangan IZN merupakan langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan zakat di Indonesia. Namun demikian, sebagai instrumen yang digunakan secara nasional, IZN perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan dinamika kelembagaan zakat yang berkembang. Perbedaan karakteristik antara BAZNAS sebagai lembaga yang terintegrasi dengan pemerintah dan LAZ sebagai lembaga independen berpotensi menimbulkan perbedaan relevansi terhadap beberapa indikator yang digunakan dalam IZN. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis terhadap struktur dan komponen IZN untuk memastikan bahwa instrumen tersebut mampu mengukur kinerja seluruh lembaga pengelola zakat secara objektif dan proporsional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, gagasan, dan konstruksi teoritis mengenai relevansi Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai instrumen pengukuran kinerja lembaga pengelola zakat di Indonesia. Penelitian kepustakaan

digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi berbagai literatur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja organisasi, tata kelola zakat, serta implementasi dan pengembangan Indeks Zakat Nasional. Menurut Creswell dan Creswell (2018), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena melalui interpretasi terhadap data non-numerik, sedangkan studi kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan sintesis kritis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen resmi yang berkaitan dengan Indeks Zakat Nasional, terutama *Indeks Zakat Nasional* yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS tahun 2016 serta dokumen penyempurnaan formula dan indikator IZN yang diterbitkan pada tahun 2020. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, regulasi pengelolaan zakat, serta dokumen yang membahas pengukuran kinerja organisasi dan tata kelola lembaga zakat. Literatur tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu evaluasi terhadap struktur, indikator, dan implementasi IZN sebagai instrumen pengukuran kinerja lembaga pengelola zakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Dokumen yang dianalisis meliputi pedoman IZN, laporan penelitian terdahulu, regulasi terkait pengelolaan zakat, serta publikasi ilmiah yang membahas model pengukuran kinerja lembaga zakat baik di Indonesia maupun di negara lain. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan dimensi makro dan dimensi mikro IZN, kemudian membandingkannya dengan teori pengukuran kinerja organisasi serta karakteristik kelembagaan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian indikator yang digunakan dalam IZN.

Analisis data dilakukan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan isi dokumen yang berkaitan dengan struktur dan indikator IZN. Menurut Krippendorff (2018), *content analysis* merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menghasilkan inferensi yang valid dan dapat direplikasi berdasarkan data tekstual. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Tahap reduksi dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, tahap penyajian data dilakukan melalui pengelompokan indikator dan temuan-temuan kritis, sedangkan tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengevaluasi relevansi indikator IZN serta merumuskan rekomendasi penyempurnaan instrumen pengukuran kinerja lembaga zakat di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Struktur dan Karakteristik Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS untuk mengukur tingkat perkembangan dan kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN dibangun berdasarkan dua dimensi utama, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro terdiri atas indikator regulasi, dukungan anggaran pemerintah, dan database kelembagaan zakat, sedangkan dimensi mikro mencakup aspek kelembagaan serta dampak zakat terhadap mustahik. Melalui pendekatan tersebut, IZN berupaya mengukur kinerja zakat secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek kelembagaan, tata kelola, dan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan oleh program zakat (Puskas BAZNAS, 2016).

Secara konseptual, kehadiran IZN merupakan inovasi penting dalam tata kelola zakat nasional karena menyediakan standar evaluasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga pengelola zakat. Sebelum adanya IZN, pengukuran keberhasilan pengelolaan zakat umumnya hanya didasarkan pada besarnya penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Pendekatan tersebut dinilai kurang memadai karena belum mampu menggambarkan efektivitas kelembagaan dan dampak yang dihasilkan. Oleh karena itu, IZN menjadi instrumen yang lebih komprehensif karena tidak hanya menilai aspek finansial, tetapi juga memperhatikan kualitas tata kelola dan kesejahteraan mustahik (Beik & Arsyianti, 2015).

Meskipun demikian, hasil telaah terhadap struktur IZN menunjukkan bahwa sebagian indikator masih berorientasi pada karakteristik kelembagaan BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi penggunaan IZN sebagai instrumen pengukuran kinerja yang bersifat nasional dan diterapkan pada seluruh lembaga pengelola zakat, termasuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki karakteristik organisasi yang berbeda.

Kritik terhadap Dimensi Makro Indeks Zakat Nasional

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi makro dalam IZN berpotensi menimbulkan bias pengukuran ketika diterapkan pada LAZ. Salah satu indikator yang paling menonjol adalah regulasi daerah yang mendukung pengelolaan zakat. Dalam praktiknya, indikator ini lebih mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam membentuk regulasi zakat daripada kinerja lembaga pengelola zakat itu sendiri. LAZ tidak memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah atau kebijakan publik terkait zakat, sehingga capaian indikator tersebut berada di luar kendali organisasi.

Permasalahan serupa juga ditemukan pada indikator dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BAZNAS sebagai lembaga resmi pemerintah memiliki peluang memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah daerah, sedangkan LAZ pada umumnya beroperasi secara mandiri melalui penghimpunan dana masyarakat. Akibatnya, penggunaan indikator dukungan APBD sebagai komponen penilaian dapat menciptakan ketimpangan skor antara BAZNAS dan LAZ meskipun kedua lembaga memiliki tingkat efektivitas pengelolaan zakat yang sama. Temuan ini menunjukkan bahwa indikator tersebut lebih tepat digunakan untuk mengukur dukungan ekosistem zakat daripada mengukur kinerja organisasi secara langsung.

Selain itu, indikator database kelembagaan zakat juga perlu ditinjau kembali. IZN menempatkan keberadaan database zakat sebagai indikator penting dalam dimensi makro. Namun, perkembangan teknologi digital menunjukkan bahwa kualitas database tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data, tetapi juga oleh kemampuan integrasi, pembaruan data secara real-time, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, indikator database dalam IZN perlu diperluas agar mampu mengakomodasi transformasi digital yang terjadi pada lembaga pengelola zakat.

Evaluasi Dimensi Mikro dan Kinerja Lembaga Zakat

Pada dimensi mikro, IZN menilai aspek kelembagaan melalui indikator penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan dana zakat. Secara umum, indikator-indikator tersebut telah mencerminkan fungsi utama lembaga pengelola zakat. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar indikator masih berorientasi pada capaian kuantitatif, seperti pertumbuhan penghimpunan dan tingkat penyaluran dana, sementara aspek kualitas tata kelola belum memperoleh perhatian yang memadai.

Dalam perspektif pengukuran kinerja organisasi modern, keberhasilan lembaga tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target finansial, tetapi juga oleh tingkat transparansi,

akuntabilitas, inovasi, dan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan (Kaplan & Norton, 1996). Oleh karena itu, pengukuran kinerja lembaga zakat idealnya tidak hanya menilai jumlah dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan, tetapi juga kemampuan lembaga dalam membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang baik (*good governance*).

Temuan lain menunjukkan bahwa indikator audit yang digunakan dalam IZN belum sepenuhnya mampu menggambarkan transparansi lembaga zakat. Audit memang penting sebagai bentuk akuntabilitas formal, namun perkembangan praktik tata kelola menunjukkan bahwa transparansi publik juga perlu diukur melalui keterbukaan informasi, akses laporan keuangan secara daring, publikasi program, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Dengan demikian, transparansi digital perlu dipertimbangkan sebagai indikator tambahan dalam pengukuran kinerja lembaga zakat.

Rekonstruksi Indeks Zakat Nasional sebagai Instrumen Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi, penelitian ini mengusulkan perlunya rekonstruksi IZN agar lebih relevan dengan perkembangan kelembagaan zakat di Indonesia. Rekonstruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan IZN secara keseluruhan, melainkan menyempurnakan indikator yang berpotensi menimbulkan bias pengukuran.

Pada dimensi makro, indikator regulasi daerah dan dukungan APBD dapat diposisikan sebagai indikator lingkungan pendukung (*enabling environment*) yang terpisah dari penilaian kinerja organisasi. Sebagai gantinya, indikator yang lebih relevan untuk seluruh lembaga zakat adalah kemitraan strategis, tingkat literasi zakat masyarakat, digitalisasi layanan zakat, dan kualitas integrasi data zakat nasional. Indikator-indikator tersebut dapat diterapkan baik pada BAZNAS maupun LAZ sehingga menghasilkan pengukuran yang lebih adil dan proporsional.

Pada dimensi mikro, perlu ditambahkan indikator transparansi digital, inovasi program pemberdayaan, kualitas layanan muzaki, dan efektivitas pengelolaan teknologi informasi. Penambahan indikator tersebut sejalan dengan perkembangan tata kelola organisasi modern yang menempatkan inovasi dan akuntabilitas sebagai faktor penting dalam keberlanjutan organisasi. Dengan demikian, IZN tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola zakat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa IZN merupakan instrumen yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan tata kelola zakat nasional. Namun demikian, beberapa indikator masih memerlukan penyesuaian agar mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik lembaga pengelola zakat di Indonesia. Penyempurnaan tersebut penting dilakukan agar IZN benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja yang objektif, inklusif, dan relevan dengan perkembangan ekosistem zakat modern.

Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan instrumen yang memiliki kontribusi penting dalam pengembangan sistem pengukuran kinerja pengelolaan zakat di Indonesia karena mampu mengintegrasikan aspek kelembagaan, tata kelola, dan dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Namun demikian, hasil evaluasi kritis mengindikasikan bahwa beberapa indikator dalam IZN, khususnya pada dimensi makro, masih berorientasi pada karakteristik kelembagaan BAZNAS dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik Lembaga Amil Zakat (LAZ). Indikator seperti regulasi daerah, dukungan APBD/APBN, dan beberapa aspek basis data kelembagaan berpotensi menimbulkan bias pengukuran ketika diterapkan pada LAZ yang tidak memiliki kewenangan maupun akses yang sama dengan BAZNAS. Selain itu, perkembangan tata kelola zakat

modern menunjukkan bahwa indikator yang digunakan dalam IZN belum sepenuhnya mengakomodasi aspek digitalisasi, transparansi publik, inovasi program, dan kualitas layanan yang saat ini menjadi faktor penting dalam pengelolaan lembaga zakat. Oleh karena itu, meskipun IZN telah menjadi instrumen yang relevan dalam mengukur kinerja zakat nasional, penyempurnaan indikator tetap diperlukan agar mampu menghasilkan pengukuran yang lebih objektif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan ekosistem zakat kontemporer.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi dan pengembangan IZN melalui penyesuaian indikator yang lebih representatif bagi seluruh lembaga pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ. Indikator yang berkaitan dengan dukungan regulasi dan anggaran pemerintah sebaiknya diposisikan sebagai indikator lingkungan pendukung (*enabling environment*) dan tidak menjadi komponen utama dalam penilaian kinerja organisasi. Sebaliknya, indikator yang berkaitan dengan transparansi digital, kualitas layanan muzaki, inovasi program pemberdayaan, efektivitas pengelolaan teknologi informasi, serta kemitraan strategis perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pengukuran kinerja zakat di masa mendatang. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengujian empiris terhadap model rekonstruksi IZN yang diusulkan dengan melibatkan BAZNAS dan berbagai LAZ di Indonesia sehingga dapat diperoleh instrumen pengukuran kinerja zakat yang lebih komprehensif, valid, dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan tata kelola zakat nasional yang berkelanjutan.

Referensi

- Abdullah, N., Derus, A. M., & Al-Malkawi, H. A. N. (2012). *The effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequalities*.
- Beik, I. S. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction of CIBEST model as measurement of poverty and welfare indices from Islamic perspective. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 87–104.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business School Press.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mubarokah, I. (2017). *Analisis kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah*.
- Neely, A., Gregory, M., & Platts, K. (2005). Performance measurement system design: A literature review and research agenda. *International Journal of Operations & Production Management*, 25(12), 1228–1263. <https://doi.org/10.1108/01443570510633639>
- Noor, A. H. M., Rashid, N. M. N. M., Ghani, N. A., & Ali, N. A. M. (2015). Efficiency of Islamic institutions: Empirical evidence of zakat organizations' performance in Malaysia. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(2), 282–286.
- Nurzaman, M. S. (2011). *Zakat and human development: An empirical analysis on poverty alleviation in Jakarta, Indonesia*.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2016). *Indeks zakat nasional*. Jakarta: Puskas BAZNAS.

- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Revisi komponen dan formula penghitungan Indeks Zakat Nasional*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Qardhawi, Y. (1973). *Fiqh al-zakah*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Shirazi, N. S. (2014). Integrating zakat and waqf into the poverty reduction strategy of the IDB member countries. *Islamic Economic Studies*, 22(1), 79–108.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.